

Analisis Akuntabilitas Pengeleloaan BUMDES yang Tidak Akitif di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Eni Pujiati¹⁾, Binti Shofiatul Jannah²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: enip44009@gmail.com¹, binti.shofiatul@uinsby.ac.id²

Abstract: *This study aims to analyze the accountability of an inactive village-owned Enterprise (BUMDES) in Sidorejo Village, Kenduruan District, Tuban Regency. This study used a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants were the Head of Sidorejo Village and the Head of BUMDES. The analysis focused on the roles and responsibilities of the managers, management coordination, organizational work guidelines, administration and bookkeeping, and accountability reports. The results showed that BUMDES Sidorejo Village had stopped its business activities since around 2022. This condition was related to the expiration of the management decree, which affected the continuity of organizational activities and BUMDES management. However, several documents were still available, including accountability reports, general cash books, cash books, and payment receipts. These documents indicate that financial recording and accountability had been carried out when the BUMDES was still active. After the BUMDES became inactive, however, management and accountability activities were no longer carried out regularly.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak aktif di Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Sidorejo dan Ketua BUMDES. Analisis dilakukan dengan melihat peran dan tanggung jawab pengelola, koordinasi pengelolaan, pedoman kerja organisasi, administrasi dan pembukuan, serta laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Desa Sidorejo sudah tidak menjalankan kegiatan usaha sejak sekitar tahun 2022. Kondisi tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan sehingga kegiatan organisasi dan pengelolaan BUMDES tidak berjalan seperti sebelumnya. Meskipun demikian, masih ditemukan dokumen berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan bukti pembayaran atau kuitansi. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pencatatan dan pertanggungjawaban pernah dilakukan ketika BUMDES masih aktif. Namun, setelah BUMDES tidak aktif, kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak lagi dilakukan secara rutin.*

Keywords : Accountability, BUMDES, Management, Inactive BUMDES

PENDAHULUAN

Salah satu cara desa dalam memanfaatkan kewenangan yang dimiliki adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Keberadaan BUMDES diharapkan dapat membantu desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat. BUMDES merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha, mengelola aset desa, serta memberikan pelayanan kepada Masyarakat (Anora, 2025). Selain memberikan manfaat ekonomi,

BUMDES juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Social Enterprise*, yaitu kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial Masyarakat (Putra & Damayanti, 2024).

Dalam pengelolaan BUMDES, akuntabilitas menjadi hal yang penting karena BUMDES mengelola sumber daya dan keuangan desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas dapat membantu menjaga keterbukaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Prasetya & Puspita, 2025). Selain pelaporan, transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam pengelolaan BUMDES. Menurut Trey akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDES (Trey et al., 2025). Jadi, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan BUMDES. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh (Sulistyowati et al., 2024) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaporan yang baik menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan BUMDES. Pelaporan yang dilakukan secara rutin dapat membantu memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Pranoto menjelaskan bahwa keduanya diperlukan agar pengelolaan BUMDES dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Pranoto & Firdaus, 2024). Meskipun demikian, pengelolaan BUMDES masih menghadapi beberapa kendala, seperti kemampuan pengelola yang terbatas, keterlibatan masyarakat yang belum optimal, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas yang masih perlu diperbaiki (Anora, 2025). Permasalahan tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan akuntabilitas dan pelaporan keuangan BUMDES. Penelitian (Gita Desipradani, 2023) juga menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDES masih dilakukan secara sederhana sehingga perlu ditingkatkan.

Putri Diana K., (2024) menjelaskan bahwa BUMDES yang tidak aktif dapat disebabkan oleh pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus yang belum jelas, pengelolaan yang kurang sesuai, serta kurangnya pelaksanaan tugas oleh pengurus. Kondisi tersebut juga ditemukan pada BUMDES Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Berdasarkan observasi awal, BUMDES Desa Sidorejo sudah tidak menjalankan kegiatan usaha sejak sekitar tahun 2022. Kondisi tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan, organisasi yang tidak lagi berjalan dengan baik, serta berkurangnya kekompakan antar pengurus. LPJ terakhir dibuat pada tahun 2021.

Sebelum mengalami kefakuman, BUMDES Desa Sidorejo telah melakukan penyusunan dan pencatatan anggaran setiap bulan. Selain itu, terdapat Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan bukti

pembayaran berupa kuitansi. Namun, setelah BUMDES tidak lagi aktif, kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan secara optimal. Penelitian (Laily Ifazah, 2024) membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BUMDES yang masih aktif, sedangkan penelitian ini berfokus pada BUMDES yang sudah tidak aktif atau mengalami kefakuman. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan BUMDES yang tidak aktif di Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

Rancangan analisis dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan BUMDES yang tidak aktif di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Aspek yang digunakan dalam penelitian (Putri Diana K., 2024) mengenai tata kelola BUMDES yang tidak aktif dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Aspek tersebut meliputi peran dan tanggung jawab pengelola, koordinasi pengelolaan, pedoman kerja organisasi, administrasi dan pembukuan, serta laporan pertanggungjawaban.

Table 1. Rancangan Analisis

No	Aspek yang dianalisis	Fokus Analisis
1	Peran dan tanggung jawab pengelola BUMDES	Pembagian tugas dan tanggung jawab masing - masing pengelola BUMDES
2	Koordinasi pengelolaan BUMDES	Hubungan dan koordinasi antar pengelola dalam menjalankan kegiatan BUMDES
3	Pedoman kerja organisasi BUMDES	Keberadaan pedoman kerja dan penerapannya dalam kegiatan BUMDES
4	Administrasi dan pembukuan BUMDES	Pencatatan transaksi serta pengelolaan dokumen dan pembukuan keuangan
5	Laporan pertanggungjawaban BUMDES	Penyusunan dan penyampaian laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola BUMDES

Sumber tabel : (Putri Diana K., 2024)

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai kondisi dan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak aktif. Berdasarkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala desa dan ketua BUMDES untuk memperoleh informasi mengenai kondisi BUMDES yang tidak aktif serta pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas BUMDES. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi BUMDES di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Dokumentasi dilakukan dengan dokumen Laporan LPJ terkait dengan Buku kas umum, Buku kas tunai, Bukti pembayaran /Kwitansi.

Pedoman dalam penelitian ini disusun dengan menyesuaikan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pedoman pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan untuk memperoleh informasi dari Kepala Desa dan Ketua BUMDES mengenai akuntabilitas pengelolaan BUMDES yang tidak aktif. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kondisi BUMDES secara langsung di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES. Bentuk pedoman tersebut mengacu pada penggunaan pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi dalam penelitian (syamsudduha syahririni, 2026) kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang tidak aktif di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Akuntabilitas dilihat melalui aspek peran dan tanggung jawab pengelola BUMDES, Koordinasi pengelolaan BUMDES, Pedoman kerja organisasi BUMDES, Administrasi dan pembukuan BUMDES, Laporan pertanggungjawaban BUMDES. Aspek tersebut mempertimbangkan penelitian Lidamona & Ayudiati, (2024) yang menunjukkan pentingnya pelaporan dan pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan BUMDES.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pengelolaan BUMDES yang tidak aktif. Tahapan analisis tersebut mengacu pada penelitian (Nengsi et al., 2025).

Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya, penelitian digunakan untuk memastikan sumber dan tr teknik. Untuk sumber dilakukan dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan Ketua BUMDES. Sementara itu, teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi serta dokumen yang diperoleh selama penelitian. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi yang ditemukan dari berbagai sumber sehingga data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan untuk memastikan sebagai cara untuk pengecekan data juga diterapkan dalam penelitian (Maharani, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Informansi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Sidorejo dan Ketua BUMDES. Kedua informan tersebut dipilih karena memiliki informasi mengenai

kondisi dan pengelolaan BUMDES, termasuk keadaan BUMDES setelah kegiatan usahanya tidak lagi berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi BUMDES serta dokumen pengelolaan yang masih tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Desa Sidorejo saat ini sudah tidak aktif dan kegiatan usahanya tidak lagi berjalan. Kondisi tersebut mulai terjadi sekitar tahun 2022. Salah satu hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan sehingga organisasi BUMDES tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Akibatnya, kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kepengurusan yang masih berfungsi memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan kegiatan BUMDES.

Sebelum BUMDES menjadi tidak aktif, pengelolaan keuangan masih dilakukan oleh pengurus. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran disusun setiap bulan dan pencatatan anggaran juga dilakukan secara bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan usaha masih berlangsung, terdapat kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDES. Namun, keadaan tersebut berubah setelah BUMDES tidak aktif. Kegiatan usaha berhenti sehingga pengelolaan BUMDES tidak dapat dilakukan seperti pada saat kegiatan usaha masih berjalan.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari dokumen yang masih tersimpan di BUMDES Desa Sidorejo. Berdasarkan hasil dokumentasi, ditemukan beberapa dokumen berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, serta bukti pembayaran atau kuitansi. Hal ini sesuai dengan (Lestari et al., 2025) yang menjelaskan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik dapat membantu BUMDES dalam menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Adanya dokumen tersebut menunjukkan bahwa pada periode ketika BUMDES masih menjalankan kegiatan, telah dilakukan pencatatan terhadap transaksi dan kegiatan keuangan. Oleh karena itu, kondisi BUMDES yang sudah tidak aktif tidak berarti bahwa dokumen pertanggungjawabannya tidak tersedia. Permasalahan yang lebih terlihat adalah berhentinya kegiatan usaha dan pengelolaan yang sebelumnya mendukung proses pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut sejalan dengan (Iswoyo & Fauzuddin, 2023) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDES berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan BUMDES.

Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Putri Diana K., 2024) yang membahas tata kelola BUMDES tidak aktif. Penelitian tersebut menemukan adanya persoalan dalam pembagian peran dan tanggung jawab, administrasi, pembukuan, serta laporan pertanggungjawaban pada BUMDES yang tidak aktif. Jika dibandingkan dengan BUMDES Desa Sidorejo, terdapat kesamaan dalam hal tidak berjalannya organisasi setelah BUMDES tidak aktif. Namun, dari sisi

dokumen terdapat perbedaan karena BUMDES Desa Sidorejo masih memiliki LPJ, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan bukti pembayaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi BUMDES yang tidak aktif dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Jika dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, adanya dokumen pertanggungjawaban dapat menunjukkan bahwa pengelola BUMDES telah melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatan yang pernah dilaksanakan. Akuntabilitas sendiri tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya laporan, tetapi juga dari bagaimana pengelola dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. (Putra & Damayanti, 2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas BUMDES berkaitan dengan tanggung jawab pengelola dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan sumber daya yang dikelolanya. Sejalan dengan hal tersebut, (Puspitasari, 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMDES membutuhkan bentuk pertanggungjawaban yang jelas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan BUMDes yang baik (Balqis Fashayu Azhima, 2026)

Berdasarkan hasil dokumentasi, BUMDES Desa Sidorejo masih menyimpan beberapa dokumen, yaitu LPJ, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, serta bukti pembayaran atau kuitansi. Dokumen tersebut dapat menjadi bukti bahwa pada saat BUMDES masih menjalankan kegiatan usaha, terdapat pencatatan terhadap transaksi dan aktivitas keuangan. Keberadaan dokumen tersebut juga dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui pengelolaan yang pernah dilakukan oleh BUMDES. (Laily Ifazah, 2024) menjelaskan bahwa pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian yang dapat digunakan untuk melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. (Sari, 2025) juga menjelaskan bahwa dokumentasi keuangan dan pencatatan yang baik dapat mendukung pelaksanaan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDES.

Meskipun dokumen pertanggungjawaban masih tersedia, hal tersebut belum menunjukkan bahwa proses akuntabilitas BUMDES Desa Sidorejo masih berjalan sampai sekarang. Hal ini karena kegiatan usaha sudah berhenti dan kepengurusan BUMDES tidak lagi berjalan seperti ketika BUMDES masih aktif. Dengan kondisi tersebut, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan secara rutin sebagaimana sebelumnya. Jadi, dalam penelitian ini akuntabilitas tidak hanya dilihat berdasarkan kelengkapan dokumen, tetapi juga berdasarkan apakah tanggung jawab pengelola masih dilaksanakan secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan (Putri Diana K., 2024) yang menemukan bahwa BUMDES yang tidak aktif dapat menghadapi masalah dalam pelaksanaan tugas, administrasi, pembukuan, dan pertanggungjawaban. (Anora, 2025) juga menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES yang akuntabel perlu didukung oleh tata kelola organisasi dan kemampuan pengelola yang memadai.

Dari hasil penelitian, masalah utama BUMDes Desa Sidorejo bukan terletak pada tidak adanya dokumen keuangan, tetapi pada berhentinya kegiatan usaha dan pengelolaan organisasi. Saat masih aktif, pengurus melakukan penyusunan anggaran dan pencatatan secara bulanan. Setelah tidak aktif, kegiatan tersebut tidak lagi berjalan. (Wayan et al., 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu (Kamal et al., n.d.) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi dapat mendukung transparansi kinerja keuangan BUMDES.

Kondisi kepengurusan juga memengaruhi keberlanjutan BUMDes. Berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan membuat kegiatan organisasi tidak berjalan seperti sebelumnya (Putri Diana K., 2024) menemukan bahwa ketidakjelasan peran dan tanggung jawab menjadi salah satu masalah pada BUMDes yang tidak aktif. Hal ini sejalan dengan (Lidamona & Ayudiati, 2024) yang menekankan pentingnya pemahaman pengelola dan pengawasan dalam akuntabilitas dan transparansi BUMDes.

Dokumen seperti LPJ, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan bukti pembayaran dapat menjadi bahan untuk melihat pengelolaan sebelumnya (Puspitasari, 2023) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mendukung akuntabilitas keuangan BUMDes. Jika BUMDes kembali aktif, pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, penyimpanan bukti, dan laporan pertanggungjawaban perlu dilakukan secara rutin. (Sari, 2025) menekankan pentingnya dokumentasi dan pencatatan dalam mendukung akuntabilitas, sedangkan (Anora, 2025) menekankan perbaikan tata kelola dan kemampuan pengelola.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BUMDES Desa Sidorejo dalam kondisi tidak aktif belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Di satu sisi, masih terdapat dokumen seperti LPJ, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan bukti pembayaran atau kuitansi yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban pada saat BUMDES masih menjalankan kegiatan. Di sisi lain, kegiatan usaha yang sudah berhenti dan kepengurusan yang tidak lagi berjalan menyebabkan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan dokumen saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas BUMDES telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab pengelola, keberlangsungan organisasi, dan kegiatan usaha juga perlu diperhatikan. Kesimpulan ini sesuai dengan (Putra & Damayanti, 2024) yang menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban pengelola dalam akuntabilitas BUMDes serta (Putri Diana K., 2024) yang menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola dapat berkaitan dengan kondisi BUMDES yang tidak aktif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan jenis informan yang digunakan, yaitu Kepala Desa dan Ketua BUMDES. Kondisi tersebut membuat informasi yang diperoleh lebih banyak menggambarkan keadaan BUMDes dari sisi pemerintah desa dan pengurus. Penelitian berikutnya dapat

melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES, seperti bendahara BUMDES, perangkat desa, BPD, maupun masyarakat. Dengan melibatkan informan yang lebih beragam, informasi mengenai akuntabilitas BUMDES dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. menunjukkan bahwa pengawasan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan BUMDES perlu diperhatikan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi (Putri Diana K., 2024) juga menunjukkan bahwa kondisi BUMDES tidak aktif dapat dikaji dari berbagai aspek tata kelola. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan BUMDES yang tidak aktif dengan BUMDES yang masih aktif agar dapat diketahui faktor yang membedakan keberlanjutan kegiatan, kepengurusan, dan pertanggungjawaban BUMDES.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BUMDES Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban belum berjalan secara optimal setelah BUMDES tidak lagi aktif. BUMDES sudah tidak menjalankan kegiatan usahanya sejak sekitar tahun 2022. Salah satu kondisi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah berakhirnya masa berlaku SK kepengurusan, sehingga kegiatan usaha dan pengelolaan organisasi tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Ketika BUMDES masih aktif, pengelolaan keuangan sudah dilakukan melalui penyusunan dan pencatatan anggaran serta didukung dengan beberapa dokumen pertanggungjawaban. Namun, setelah kegiatan usaha berhenti dan kepengurusan tidak lagi berjalan, proses pengelolaan dan pertanggungjawaban juga tidak dapat dilakukan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dilihat dari adanya dokumen keuangan, tetapi juga dari bagaimana tugas dan tanggung jawab pengelola tetap dijalankan serta bagaimana pengelolaan organisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, dokumen yang masih tersedia dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi pengelolaan BUMDES pada periode sebelumnya. Apabila BUMDES Desa Sidorejo akan diaktifkan kembali, perlu adanya kepengurusan yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai, serta pencatatan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin. Dengan demikian, pengelolaan BUMDES diharapkan dapat berjalan lebih teratur dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anora, R. R. M. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel*. 5(1).
- Gita Desipradani. (2023). *Strategi Bumdes Sidomapan Untuk Meningkatkan*. XX(2).\
- Iswoyo, A., & Fauzuddin, Y. (2023). *Volume . 19 Issue 2 (2023) Pages 415-425 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Laporan*

- keuangan BUM Desa : kendala , akuntabilitas , transparansi , dan keberlanjutan Village-own enterprise financial report : constraints , accountability , tranparancy , and sustainability.* 2(2), 415–425.
- Kamal, M., Sagala, A., Siregar, S., Islam, U., Sumatera, N., Keuangan, K., Akuntansi, S. I., Informasi, S., & Pada, K. K. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Kinerja Keuangan pada BUMDes.* 1613–1627. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p15>
- Laily Ifazah. (2024). *Jurnal Ekonomi Akuntansi.* 2, 73–81.
- Lestari, S. A., Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2025). *Analisis Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes Purwa Binangkit (Studi Kasus Pada Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap).* 10(204), 2529–2542.
- Lidamona, M. S., & Ayudiati, C. (2024). *Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Bantul Yogyakarta.* 1(2), 127–131.
- Maharani, C. I. (2025). *Ketika Dana Desa Terbagi : Implikasi Kebijakan Alokasi BUMDes terhadap Prioritas Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul.* 3(1), 231–242.
- Nengsi, S. W., Hafid, A., & Buhasyim, M. A. (2025). *Analisis Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mart dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada BUMDes Desa Mallari Kecamatan Awangpone).* 4(5), 8233–8241.
- Pranoto, P. I., & Firdaus, S. U. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola BUMDes (Studi Kasus BUMDes Sejahtera Cemani).* 252–266.
- Prasetya, W. A., & Puspita, P. (2025). *Determinan pengelolaan keuangan BUMDes : perspektif transparansi dan akuntabilitas.* 5(1), 43–54. <https://doi.org/10.31603/bacr.13952>
- Puspitasari Universitas. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes : Sebuah Perspektif Peran Pemerintah Mika Puspitasari Pendahuluan.* X, 21–41.
- Putra, N. B., & Damayanti, F. (2024). *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Uncovering the Meaning of Accountability : Is the Village- Owned Enterprises (BUMDes) Accountable ?* 12(1), 55–68.
- Putri Diana K. (2024). *Jurnal Ekonomika.* 15(2), 231–241.
- Sari, D. N. (2025). *Financial Accountability in Village-Owned Enterprises Governance : Akuntabilitas Keuangan dalam Tata Kelola Perusahaan Milik Desa.* 16(2), 1–8. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i2.1257>
- Sulistiyowati, E., Kristiawan, A., Setyawardani, L., & Dewi, M. A. (2024). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Akuntabilitas Pelaporan Dalam Upaya Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sesuai SAK ETAP.* 08(2019), 4798–4807.
- syamsudduha syahririni. (2026). *Table Of Contents.* 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13872>
- Trey, G., Br, I., Arsyanti, R. D., Capriani, J., Trey, G., Br, I., Arsyanti, R. D., Capriani, J., Studi, P.,

- Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Trey, G., Br, I., Arsyanti, R. D., & Capriani, J. (2025). *Analisis Akuntabilitas Inovasi BUMDes untuk Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi di Desa bagi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes potensi desa secara optimal dan memberdayakan masyarakat setempat . Secara*. 7(1), 210–226.
- Wayan, N., Lyantini, J., & Atmadja, A. T. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela , Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar)*. 13(3), 466–470.